

**PERAN SOSIALISASI POLITIK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA PADA PILKADA 2019 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

***THE ROLE OF POLITICAL SOCIALIZATION ON BEGINNING VOTER
PARTICIPATION IN THE 2019 ELECTIONS IN MEGANG SAKTI SUB-DISTRICT
MUSI RAWAS DISTRICT***

Agus Tiansah

Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas
Email: atiansah2@gmail.com

Abstrak

Sosialisasi politik merupakan salah satu pilar yang urgen dalam pelaksanaan pesta demokrasi, sekaligus mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih suatu pemilihan, yang dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Atas dasar itu maka peneliti termotivasi untuk membuktikan terkait bahwa sosialisasi politik memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2019 yang ada di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh selama penelitian dilapangan dari para informan yang berjumlah 30 orang sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi politi memiliki pengaruh terhadap meningkatnya partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam pilkada 2019. Adapun factor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik pemilih pemula karena pengaruh informasi dan pemahaman tentang proses demokrasi atau pemilihan umum terkhusus pada pemilu pilkada 2019.

Kata kunci : Sosialisasi, partisipasi, Pemilih Pemula

Abstract

Political socialization is one of the urgent pillars in the implementation of a democratic party, as well as having an influence on the level of voter participation in an election, in this case the regional head election. On this basis, the researcher is motivated to prove that political socialization has an important role in increasing the participation of first-time voters in the 2019 regional head elections in Megang Sakti District, Musi Rawas Regency. In this study, the researcher used descriptive qualitative research by describing and interpreting data and facts obtained during field research from 30 informants so that in the end a hypothesis could be formulated. The results of the study show that the socialization of politics has an influence on increasing the political participation of first-time voters in Megang Sakti District, Musi Rawas Regency in the 2019 regional elections. The factors that influence the increase in the political participation of young voters are due to the influence of information and understanding of the democratic process or general elections, especially in the 2019 regional election elections. .

Keywords: Socialization, participation, Beginner Voters

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu pilar penting dalam sebuah demokrasi, salah satu konsep modern yang digagas oleh Josep Scumpeter (2005) yang meletakkan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala bagi sebuah system politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati, salah satu pemegang kunci keberhasilan adalah adanya sosialisasi politik yang bisa memberikan pemahaman tentang tata cara maupun pentingnya kepemimpinan disuatu daerah, dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup maka pemilih dapat menganalisis dan punya sikap pendirian kepada mereka yang akan pilih.

Walaupun dengan jumlah pemilih yang tidak seberapa dibandingkan dengan pemilihan Gubernur pada tingkat provinsi, namun dengan 14 Kecamatan dan 189 Desa maka dalam pelaksanaan pemilihan Bupati di Kabupaten Musi Rawas tidak semudah membolak balikkan telapak tangan, terutama untuk kandidat Calon bupati dan calon wakil bupati yang harus melaksanakan kampanye di 14 Kecamatan yang secara geografis terdapat daerah-daerah yang sulit untuk ditempuh. Maka dari itu tanpa adanya sosialisasi yang masiv dari semua pihak terutama parpol dan penyelenggara pemilu, akan sangat dimungkinkan bahwa apa yang menjadi tujuan visi misi dari para calon tidak dimengerti oleh calon pemilih. Banyaknya pemilih yang apatis terhadap dunia politik karena ketidakpercayaan terhadap para politisi yang mereka pilih sebelum-sebelumnya dan kejenuhan terhadap para pemimpin, membuat daftar panjang bagi parpol dan penyelenggara untuk bekerja lebih giat guna meningkatkan partisipasi pemilih. Terlebih lagi dengan banyaknya kontestan calon bupati dan calon wakil bupati yang mengikuti pilkada membuat persaingan memperebutkan suara terbanyak menjadikan masyarakat semakin sulit menentukan pilihannya, salah satunya karena timbulnya rasa ketidakpastian, terutama bagi pemilih pemula yang di gambarkan dari golongan remaja yang karna usianya baru

bisa memilih, karena itu kandidat harus mengkomunikasikan dengan cara memperkenalkan dan mengsosialisasikan diri kepada masyarakat secara terus-menerus sarana sosialisasi yang dapat digunakan adalah iklan di media massa karena kemampuan media mempengaruhi khalayak upaya komunikasi di harapkan mampu memberikan informasi bagi pemilih pemula untuk mengurangi rasa ketidakpastian.

Proses pemembetulan dan perubahan sikap, peranan sosialisasi politik sangat besar pengaruhnya dalam peningkatan partisipasi calon pemilih terutama apabila dilakukan interaksi dengan masyarakat secara langsung. Masyarakat yang memilih demokrasi sebagai sistem kenegaraannya, pemilu merupakan salah satu tonggak demokrasi dan instrumen untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yaitu terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak serta mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak dasar mereka sebagai warga negara karena itu untuk melihat ada tidaknya demokrasi dalam penyelenggaraan negara, indikatornya dapat dilihat dari pemilu yang dilakukan secara bebas dan berkesinambungan.

Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial dan golongan, sesungguhnya mereka semua memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu diperlukan tata cara dan prosedur yang disebut sistem pemilu. Sistem pemilu mencakup dua hal. Pertama, nilai-nilai normatif yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur bagaimana membagi kekuasaan dalam lembaga perwakilan secara proporsional sesuai dengan dukungan politik yang tergambar dari hasil perolehan suara dalam pemilu. Kedua, proses pemilihan yaitu mekanisme pemilihan yang meliputi pengelolaan pemilu, pemilihan di tempat

suara pemungutan suara, perhitungan suara, petugas pemilu, penetapan hasil pemilu dan menetapkan hasil pemilu menjadi kursi di lembaga perwakilan maupun pada tingkat eksekutif.

Dalam pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 lalu telah diikuti oleh dua pasang calon yang dilaksanakan secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas. Dalam rangka usaha untuk memperoleh simpati masyarakat sehingga memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada pilkada 2019 di Kabupaten Musi Rawas, kedua kandidat berlomba-lomba melakukan kampanye, dan Kecamatan Megang Sakti merupakan Kecamatan dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Terbesar Di Kabupaten Musi Rawas sekaligus penentu kemenangan dalam setiap pemilihan umum eksekutif. Atas dasar itulah dari empat belas Kecamatan yang berada di Kabupaten Musi Rawas menjadikan Kecamatan Megang Sakti menjadi salah satu daerah yang diminati oleh keenam kandidat untuk dimenangkan tanpa terkecuali terhadap pemilih pemula yang ada di Kecamatan Megang Sakti.

Jumlah penduduk Kecamatan Megang Sakti yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 berjumlah kurang lebih 38600 orang yang didalamnya juga sudah termasuk pemilih pemula. Dengan jumlah DPT yang begitu besar dan sebagai penentu dalam setiap kemenangan di pemilihan umum, berbagai cara dan pendekatan dilakukan para kandidat untuk meraih simpati terutama pemilih pemula karena ditengah situasi pandemic yang belum selesai. Pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan hanya sebatas sosialisasi melalui media elektronik dengan menampilkan bentuk kampanye yang lebih menarik sehingga pemilih pemula yang dikenal kaum milenials menjadi tertarik terhadap pemilu pilkada tahun 2019.

Secara umum peran dapat didefinisikan menurut *Bauer* (2007:55) dalam *Haris* (2012:204) sebagai persepsi mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku atau

dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut. Dengan kata lain peran dapat diartikan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa peran adalah suatu konseptual yang melibatkan penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan atau bisa dikatakan suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat. *Haris* (2012:212) mengemukakan peran berarti laku, bertindak, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan atau memegang kekuasaan. Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan menurut historis atau sejarah konsep peran adalah karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas. Sedangkan menurut ilmu sosial peran adalah suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu. Dari pendapat di atas disimpulkan peran adalah sesuatu yang mempunyai memiliki pengaruh sesuai dengan fungsinya.

Sosialisasi politik merupakan sebuah usaha/ kegiatan memberikan pengenalan kepada individu agar individu tersebut mengerti system politik dan dapat membuat reaksi politik atas gejala politik yang terjadi. *Gabriel A. Almond* membatasi sosialisasi politik sebagai bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam system politiknya. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik mempunyai dua esensi penting yaitu adanya proses dan tujuan. Proses yang dimaksud adalah memberikan pemahaman, pengetahuan, nilai-nilai dan sikap politik. Sedangkan tujuan yang dimaksud yaitu meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik.

Partisipasi adalah keikutsertaan, peranserta atau keterlibatan yang dengan keadaan lahirnya. *Budiardjo* (1994:81) Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan

program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi. *Milbarth* dalam Budiardjo (1994:89) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, *pertama* apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri proses politik. *Kedua*, spektator artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator artinya mereka yang secara aktif ikut terlibat dalam proses politik, yaitu komunikator, spesialis mengadakan tatap muka, aktifis partai dan pekerja kampanye, dan aktifis masyarakat.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi adalah bahwa setiap orang mengetahui diri dan dunianya lebih baik dari pada orang lain termasuk para ahli yang membuat keputusan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Pertama, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap kepercayaan kepada pemerintah adalah penelitian seseorang terhadap pemerintah.

Pemilih menurut Sinaga (2003:118), adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah/ pernah kawin, pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjukkan oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. Menurut

Sekretaris Jendral KPU biro teknis dan Humas (2010).

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, sehingga semua hal-hal yang mereka anggap kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih menurut Sekretariat Jendral KPU Biro Bknis dan Humas 2010 yaitu WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah menikah, tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya, terdaftar sebagai pemilih dan Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / sudah tidak lagi menjadi TNI/Keolisian).

Dasar hukum yang mendasari pemilihan kepala daerah (pemilukada) ini yaitu Amandemen Kedua (2002) Pasal 18 UUD 45, Ayat (4) " Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan di wilayah provinsi dan/ wilayah kabupaten dan/ kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Supono (2005:106), setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa penyelenggaraan pilkada harus dilaksanakan secara langsung di daerah yaitu Pemilihan kepala daerah langsung adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hak otonomi daerah, Dalam rangka memberikan tanggung jawab kepada

daerah untuk menyelenggarakan proses demokrasi di tingkat lokal dan Memberdayakan daerah dalam rangka memeperkuat struktur pemerintahan dalam bangunan piramida, dimana pemerintahan nasional ditopang dengan sistem pemerintahan daerah yang kuat.

Sosialisasi politik partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sudah optimal. komunitas dan masyarakat. Pada tahap materi sosialisasi politik, panitia pilkada sudah optimal seperti menggelar jejaring media sosial dan memberikan segala edukasi kepada pemilih pemula dan masyarakat serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah. Kemudian pada tahap mekanisme sosialisasi politik sudah optimal, dilakukan panitia kecamatan di setiap desa untuk menjangir pemilih baru (Herman, S., Malik, I., & Sari, R. 2021).

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sendiri telah gencar melakukan sosialisasi terkait pemilih kepala daerah baik secara langsung maupun melalui media sosial yang ada saat ini, dan juga melalui spanduk dan iklan yang dipasang di surat kabar dan papan jalan. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menyasarkan sosialisasi politik kepada pemilih pemula di Kota Padang dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah menengah atas dan kampus-kampus di sekitar Kota Padang untuk menyebarkan informasi terkait pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum berharap bahwa partisipasi bisa meningkat hingga 70%, namun pada kenyataannya, persentase pada pilkada Kota Padang tahun 2018. Disinilah peran sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum dibutuhkan guna mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Padang Khususnya pemilih pemula, untuk menggunakan hak suara mereka guna terselenggaranya kegiatan demokrasi yang baik di Kota Padang (Wahyudi, M. I., & Adnan, M. F. 2019). Peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum, dengan demikian diperlukan suatu upaya sistematis bagi

lembaga KPU untuk melakukan model komunikasi yang tepat kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga dapat menciptakan proses demokratisasi di Indonesia (Putri, M. P. 2016). Pendapat lain juga mengatakan, pemilihan umum merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Artinya pemilu merupakan roh demokrasi yang benar-benar merupakan sarana pemberian mandat kedaulatan rakyat (Kurniawan, R. C. 2013).

Dengan melihat rendahnya pengaruh Status Sosial Ekonomi, maka diharapkan pemerintah setempat dapat meningkatkan Status Sosial Ekonomi yang dimiliki masyarakat, yang mana hal ini dapat berpegaruh dengan meningkatnya Partisipasi Politik yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah penelitian ini. Dengan besarnya pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda, dimana hal ini juga menjelaskan bahwa variabel atau faktor lain juga berpengaruh terhadap Partisipasi Politik. Karena besarnya faktor lain yang mempengaruhi Partisipasi Politik di wilayah penelitian ini, selayaknya juga dilakukan penelitian serupa namun dengan menggunakan variabel yang berbeda yang mana diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi maupun cara-cara lain untuk meningkatkan Partisipasi Politik di wilayah penelitian yang sama pada penelitian ini, seperti kesadaran politik, money politic, dan lain-lain (Syarif, M. A. 2016).

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik bagi pemilih pemula adalah sebagai pelaksanaan amanat fungsi sosialisasi politik dalam UU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi pemilih pemula sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan salah satu agen sosialisasi politik dengan memberikan pendidikan politik bagi pemilih, memaksimalkan proses sosialisasi, melakukan survey atau jejak pendapat,

dan meningkatkan kinerja pemilu. Faktor-Faktor yang mempengaruhi KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik adalah mekanisme sosialisasi politik, Pola sosialisasi politik, faktor sosial ekonomi dan sistem politik (Sari, P. D. S., Rube'i, M. A., & Firmansyah, S. 2022). Pendapat lain juga dijelaskan oleh Novianty, F., & Octavia, E. (2018) beliau mengatakan bahwa (1) Gambaran umum tentang realitas partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; (2) Program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; (3) Hambatan yang dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; (4) Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatasi hambatan untuk menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat.

Media sosial memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula terkhusus media sosial yang melalui penggunaan teknologi informasi komunikasi baik secara elektronik, media cetak maupun daring. Sementara media sosial yang dilakukan secara konvensional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilih pemula. Pemilih pemula akan tertarik dengan politik sambil bersantai, walaupun terdapat pengaruh media sosial melalui sekolah dan keluarga namun tidak berpengaruh signifikan karena mereka adalah generasi yang akrab dengan penggunaan media. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan media sosial berpengaruh terhadap partisipasi Politik pemilih pemula pada pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 (Andriyendi, D. O., Nurman, S., & Dewi, S. F. 2023).

Maka dari itu diasumsikan bahwa partisipasi politik adalah komponen utama dalam pelaksanaan Pemilu. Keikutsertaan dalam Pemilihan umum merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai

pelayan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, terdapat kategori pemilih yang menarik untuk diamati yakni pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan orang yang pertama kali memberikan suaranya dalam pemilu (Nur & Sukma, 2018). Pemilih Pemula Menurut PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum pasal 1 ayat 28 menjelaskan bahwa Warga Negara yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah kawin atau pernah kawin di sebut dengan pemilih. Kategori Pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia pada saat pemilihan yang genap berusia 17 tahun dan mempunyai hak pilih untuk memilih berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu (Nur, W. dan P. S. 2018). lebih lanjut lagi dijelaskan oleh (Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. 2019) partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dikategorikan tinggi, hal ini karena pemilih pemula sangat antusias dalam memberikan hak suaranya .2)partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi beberapa faktor anantara lain pengaruh orang tua, kondisi lingkungan, pengalaman beorganisasi, modernisasi.3)partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, kampanye, lobby, kegiatan organisasi, contacting, tindakan kekerasan.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu mekanisme untuk memilih pemimpin, dimana lembaga Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung berperan sangat penting dalam pelaksanaan suksesnya pemilu. Dalam hal ini KPU kota Bandar Lampung memiliki visi, misi, dan tujuan. Serta peran dalam mensosialisasikan terkait dengan pemilu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena dalam pemilihan umum pada saat pemilihan ada masyarakat golongan putih atau tidak menggunakan hak pilih nya sebagaimana melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang taat terhadap aturan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu untuk pemilih yang sudah berusia 17 tahun sudah dapat menggunakan hak pilih nya sebagai warga Negara untuk menentukan nasib bangsa dan Negara lima tahun kedepan, maka dari itu sangat disayangkan jika masyarakat tidak menggunakan hak pilih nya (Baihaki, A. H. 2021). Kasus serupa dikatakan oleh (Wibowo, M. T., & Hasan, E. H. E. 2017) bahwa Keluarga yang merupakan salah satu agen sosialisai politik dapat mensosialisasi politik kepada pemilih pemula di Kecamatan Lueng Bata yang pengetahuan politiknya masih minim. Minimnya pemahaman politik pada pemilih pemula dan kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh keluarga berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi politiknya. Sehingga akan meningkatnya angka golput. Melihat kondisi saat ini pemilih pemula menjadi target suara pada saat pemilu. Maka sangat disayangkan apabila pemilih pemula ini tidak memiliki pemahaman politik dalam menentukan sikap politiknya. Karenanya di perlukan fungsi keluarga sebagai kelompok pertama yang memberikan pendidikan kepada setiap individu untuk mensosialisasikan politik kepada pemilih pemula.

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Tahun 2015 Kota Semarang menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih walikota. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada di Kota Semarang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemula dalam pemilukada maupun pada pemilihan presiden pada tahun 2019, maka perlu dilakukan kajian penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilihan Walikota Semarang di

Kota Semarang, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui kesiapan para pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang (Lestari, E. Y., & Arumsari, N. 2018).

Demokrasi dianggap sebagai yang paling ideal di Indonesia sebab memberikan penghormatan terbesar kepada masyarakat dan memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam membuat kebijakan publik, mengekspresikan pandangan mereka, dan membentuk organisasi yang baik tanpa menyebabkan kerugian bagi mereka. Pelaksanaan pilkada adalah bentuk dan metode demokrasi daerah (Pemilukada). Pemilihan kepala daerah adalah cara untuk menunjukkan kedaulatan dan membuktikan bahwa pemilih adalah penduduk daerah. Partisipasi pemilih yang rendah adalah masalah yang sering terjadi dalam pemilihan pasca-konflik. Sosialisasi politik adalah salah upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi politik oleh KPU Kota Semarang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak 2020 (Andhito, R. D. 2022).

Pemilu di Indoneisa merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung

jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu (Wardhani, P. S. N. 2018).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya dan Tipe Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian tipe eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan fakta faktual tentang peran sosialisasi politik dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2019 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Sumber data yang digunakan ialah Data Primer dan data sekunder

Informan dalam penelitian ini adalah para pemilih pemula yang telah memenuhi syarat berusia 17-21 tahun, perwakilan dari beberapa partai politik, dan perwakilan penyelenggara pemilu baik dari KPU maupun BAWASLU sampai tingkatan Desa. Untuk selanjutnya Teknik Pengumpulan data dan informasi yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi guna mengetahui secara akurat Peran sosialisasi politik dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2019 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan serta menginterpretasikan data yang di peroleh dari proses mengorganisasikan dan mengurutkan data yang diperoleh dari lapangan dan dari para informan kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, menurut Moleong (2005:89), yaitu:

Reduksi Data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehinggah kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehinggah lebih mudah dikendalikan.

Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan, Penyajian Data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema, dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian.

Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya, Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian merupakan verifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERAN SOSIALISASI POLITIK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2019 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS.

a. Pelaku Sosialisasi

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik pada pemilu eksekutif maupun legislatif disemua tingkatan, pelaksanaan sosialisasi merupakan hal yang sangat penting guna memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pemilu dan estafet kepemimpinan. Pelaksanaan sosialisasi politik dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat akan maksud dan tujuan dari pemilihan umum tersebut. Kualitas demokrasi juga sangat ditentukan dari tingkat pengetahuan masyarakat tentang pemilihan umum,

karena tingkat pemahaman akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh satu staff KPU mengatakan bahwa :

“Dalam setiap pemilihan umum tanpa terkecuali Pilkada tahun 2019 kemaren semua stake holders seharusnya melakukan sosialisasi politik sebelum dilakukannya pemilihan langsung oleh masyarakat. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat KPU juga menekankan semua pihak yang terlibat dalam pilkada terutama partai politik wajib melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada seluruh elemen masyarakat. Kami melakukan sosialisasi dengan berbagai cara terutama untuk pemilih pemula yang pasti para anak-anak muda maka kami lebih banya menggunakan media sosial yang biasa digunakan oleh kaum muda”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sosialisasi politik sangat penting dilakukan dalam proses pelaksanaan demokrasi, pemahaman yang kurang tentang politik terutama bagi pemilih pemula jelas berdampak terhadap partisipasi politik dalam setiap pemilihan umum. Tingkat partisipasi yang tinggi para pemilih pemula akan seiring sejalan dari tingkat pemahaman dan ketertarikan mereka terhadap dunia politik.

b. Pemahaman dan Pengetahuan Tentang Informasi

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh seluruh *stake holders* dalam pilkada sangat berdampak terhadap pemahaman politik kepada masyarakat tanpa terkecuali pemilih pemula. Dalam pilkada di Kabupaten Musi Rawas selain para calon beserta parpol, sosialisai yang masif seharusnya dilakukan oleh instansi terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu diperkuat dengan hasil observasi dan wawancara bahwa masyarakat melihat iklan dan pengumuman secara langsung

tentang pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 beserta seluruh calon kontestan yang mengikuti. Meskipun hanya sekilas karena biasanya pemasangan iklan para calon ditempatkan dipinggir jalan menggunakan spanduk. Seperti yang diungkapkan oleh Andri 18 Tahun pemilih pemula Desa Megang Sakti II Kec. Megang Sakti bahwa :

“saya pernah melihat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pilihan tahun 2019 di Spanduk-spanduk pinggir jalan, tetapi hanya sekali lewat yang pada intinya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Musi rawas.

Diperkuat juga oleh Nia Kurniasih 19 Tahun pemilih pemula yang mengatakan bahwa :

“pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019 saya mengetahui dari teamses anggota partai politik yang mendukung para calon Bupati dan Wakil Bupati berupa selebaran kertas yang ada gambar dan Visi Misi para calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pilitik yang dilakukan oleh para stake holders baik oleh oleh parpol, KPU maupun para calon belum bisa maksimal karena masyarakat khususnya pemilih pemula hanya melihat sekilas tentang para kandidiat calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengerti lebih dalam apa saja yang akan dilakukan atau dicapai oleh para kandidat jika mereka menjadi Bupati Dan Wakil Bupati.

2. Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada PILKADA Tahun 2019 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Partisipasi politik seseorang dalam kehidupan politik dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas politiknya, begitu juga bagi pemilih pemula yang pada dasarnya sebagian besar baru mengenal dunia politik. Berdasarkan

hasil wawancara para pemilih pemula meraka menyatakan yang mereka lakukan dalam pemilukada Tahun 2019 bahwa :

1) Mencoblos atau memberikan suara

Tingkat pemahaman dan pengetahuan dalam setiap pemilihan yang ditambah arti demokrasi yang semakin meluas dikalangan masyarakat sangat memberikan pengaruh yang berarti bagi dinamika politik bangsa. Salah satu indikator berjalannya politik secara demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Untuk mengukur hal itu, kita bisa mengamati bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat kita, selalu ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat di hindari. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola fikir dan cara pandanag yang berbeda dalam melihat atau mengartikan persoalan.

Dalam kasus Pilkada tahun 2019 pemilih pemula yang ada di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Akan tetapi bentuk peningkatan yang dilakukan para pemilih pemula belum sepenuhnya karena kesadaran tetapi lebih banyak karena pengaruh teman-teman dekat maupun keluarga lingkungan sekitar. Hai itu terlihat dari hasil observasi dan wawancara yang menyatakan bahwa :

“saya dan teman-teman senang dalam pilkada Tahun 2019 karena diajak temen-temen untuk mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan itu merupakan pengalaman pertama ikut pencoblosan pemilu, penasaran pertama kali bisa memilih”

Besarnya rasa ingin tahu dan ditambah rasa penasaran karena pemberitaan disetiap iklan atau spanduk yang terpasang membuat pemilih pemula ingin menyalurkan hak suaranya dengan cara mencoblos dengan benar menjadi salah satu dorongan yang membuat pemilih pemula yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap bersemangat untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

2) Kampanye atau lebih pada sebatas mengajak

Kampanye pemilu merupakan sarana pesta demokrasi yang di laksanakan bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka usaha untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada hari pemilihan nanti. Kampanye adalah bagian yang penting dalam kegiatan pemilu, ada berbagai cara yang dilakukan para calon bupati Kabupaten Musi Rawas untuk menarik simpati masyarakat, seperti panggung terbuka, serta pemberian bantuan pembangunan tempat-tempat umum seperti toko-toko besar, masjid dll.

Para pemilih pemula yang ada dikecamatan Megang sakti kabupaten Musi Rawas telah banyak yang mengikuti proses kegiatan politik terutama saat kampanye. Pemilih pemula yang rata-rata anak muda sangat antusias mengikuti kampanye meskipun sangat terbatas karena dalam situasi Covid 19. Hal ini diungkapkan oleh Candra 19 Tahun pemilih pemula bahwa :

“saya sering ikut kampanye dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para calon Bupati dan Wakil Bupati, setelah itu saya mengajak teman-teman saya untuk memilih calon yang saya senangi atau saya dukung”

Salah satu bentuk partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Tempe Kabupaten Musi Rawas adalah kampanye, seperti hasil wawancara di atas alasan para pemilih pemula turut berpartisipasi pada kampanye berbeda-beda selain untuk betul-betul berkampanye yang menjadi alasan pemilih pemula turut serta dalam kampanye ialah berkumpul dengan teman-teman mereka.

D. KESIMPULAN

Peran partisipasi politik dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2019 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yaitu sebagai Pemberi Informasi yaitu para *stake holders* memiliki peran yang sangat penting pada peningkatan partisipasi pemilih pemula di karnakan posisinya sebagai pemberi informasi yang banyak di butuhkan

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pilkada 2019 di Kabupaten Musi Rawas, adanya sosialisasi membantu masyarakat terkhususnya pemilih pemula untuk mempelajari cara berpartisipasi dengan benar pada pilkada. Yang kedua sosialisasi dapat memperluas pengetahuan dan pengetahuan yaitu membantu masyarakat dan pemilih pemula memperluas wawasan dan pengetahuannya mengenai pemilihan umum sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat dan pemilih pemula mengenai fungsinya sebagai warga negara yang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam peran sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada Tahun 2019 di Kab. Musi Rawas adalah peran seluruh Stake Holders terkait baik KPU, para kandidat, keluarga, lingkungan tempat tinggal serta tokoh masyarakat harus di tingkatkan melalui pendidikan politik secara dini pada pemilih pemula sehingga dapat meningkatkan kualitas peran pemilih pemula dalam partisipasi politik Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi dalam dunia politik seperti pemilu, serta pemberian pendidikan politik yang ditunjukkan khusus untuk para pemilih pemula sehingga dapat merangsang keinginan pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik

E. REFERENSI

Andriyendi, D. O., Nurman, S., & Dewi, S. F. (2023). Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1), 101-111.

Andhito, R. D. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kota Semarang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak 2020* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Arifin, 2010. *Peran media Massa dalam bidang sosial dan politik*. Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Baihaki, A. H. (2021). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasa (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Budiardjo, Miriam, 1994. *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama..
- Effendy, 2009. *Keterbukaan Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.
- Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 293-303.
- Haris, 2012. *Peran dan peranan Media Massa Dan Komunikasi*. Bandung: PT. pustaka sinar harapan.
- Herman, S., Malik, I., & Sari, R. (2021). Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih-Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1371-1383.
- Ida, Rachmah, 2012. *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Pranada Media Group. Jakatra.
- Kurniawan, R. C. (Januari 2013). Orientasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Pringsewu 2011 (Studi Pada Siswa/i SMUN Di Kabupaten Pringsewu). *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan walikota semarang di kota semarang. *Integralistik*, 29(1), 10.
- Lexy J, Moleong, 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nur, W. dan P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jupiis: *Jurnal Pendidikan Ilmu-*

- Ilmu Sosial*, 10(1), 57.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kalimantan Barat. *ejurnal Ilmu-Komunikasi*, 30-34
- Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education And Social Science Journal (CESSJ)*, 1(1).
- Sari, P. D. S., Rube'i, M. A., & Firmansyah, s. (2022). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politikbagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak. *Character And Civic*, 2(2), 39-50.
- Sekretariat Jendral Kpu Biro Teknis dan Humas,2010. *Modul Pemilih Untuk Pemula*, Jakarta : KPU Vol 1 No. 260.
- S.H Surandajang. 2013. *Pilkada Langsung*. Kata penerbit. Jakarta.
- Sinaga, Kasturios 2003. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota, dan Kabupaten*. Yogyakarta. Pustaka
- Supono, Supto 2005, *Penyimpangan Pilkada*. Bandung. PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Suyanto Bagong 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Orbit Sakti.
- Syarif, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Walikota 2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. *e-Jurnal Pemerintahan Integratif*, 4(4)
- Wahyudi, M. I., & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang 2018. *Jurnal Perspektif*, 2(3), 157-163.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Warsito, 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wibowo, M. T., & Hasan, E. H. E. (2017). Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata B. Aceh); Political Socialization For Voters In The Family Environment (Case Study Kecamatan Lueng Bata B. Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(2), 536-551.